



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TASFIYAH SRI PRIHATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 1000669

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.590 m²/340 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m²/250 m² di KAB / KOTA SEMARANG, Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 105.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX (4X2) MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 8.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.870.866

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.958.370.866

III. HUTANG

Rp. 72.265.780

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.886.105.086

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.